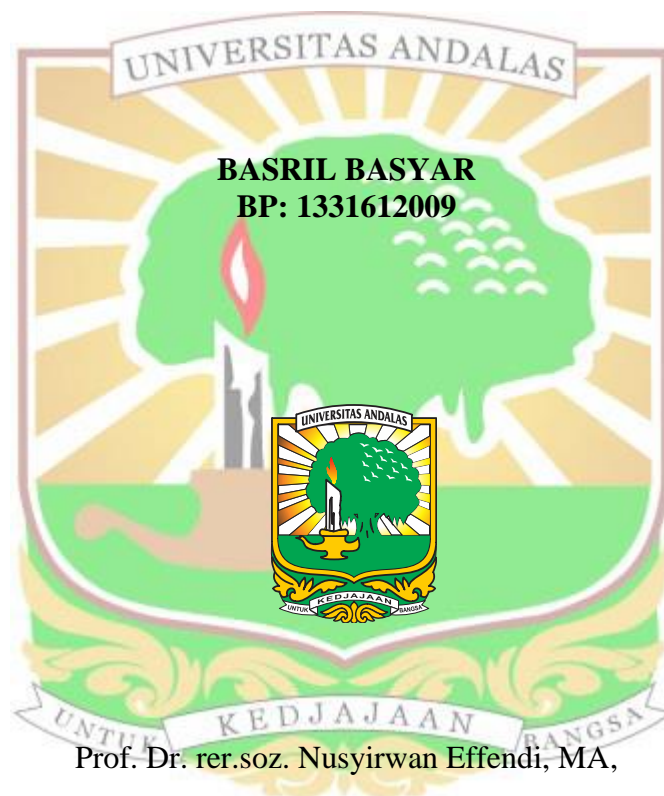


**KEBIJAKAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB SEKTOR PETERNAKAN
SEBAGAI ALAT PEMACU PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI
YANG BERKELANJUTAN DI SUMATERA BARAT**

DISERTASI



**BASRIL BASYAR
BP: 1331612009**

Prof. Dr. rer.soz. Nusyirwan Effendi, MA,

Prof. Dr. Ir. James Hellyward, MS; Dr. Asmawi, MS)

**PRODI. ILMU PERTANIAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2018**

Kebijakan Penyuluhan Pertanian Sub-Sektor Peternakan Sebagai Alat Pemacu Pencapaian Swasembada Daging Sapi yang Berkelanjutan di Sumatera Barat

Oleh: Basril Basyar

(Dibawah bimbingan Prof. Dr. rer.soz. Nusyirwan Effendi, MA, Prof. Dr. Ir. James Hellyward, MS; Dr. Asmawi, MS)

ABSTRAK

Swasembada daging sapi bertujuan untuk membantu terwujudnya ketahanan pangan masyarakat, khususnya pangan hewani. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peternak sapi rakyat dijadikan sebagai pelaku utama dan sekaligus menjadi mitra utama pemerintah. Namun demikian, kondisi sumberdaya manusia peternak rakyat masih belum memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan usaha-usaha tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penyuluhan sub-sektor peternakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Agar pelaksanaan penyuluhan sub sektor peternakan dapat berjalan lancar, dibutuhkan dasar hukum yang kuat dan jelas. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki kebijakan tertinggi sebagai dasar pelaksanaan penyuluhan sub-sektor peternakan untuk membantu tujuan swasembada daging sapi. Berdasarkan pada keadaan ini, maka dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menjelaskan kondisi, proses, potensi dan kendala dalam perumusan kebijakan penyuluhan sub sector peternakan, serta mendisain pola proses perumusan kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan.

Dengan memakai metode kualitatif, penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat yang terfokus pada wilayah sentral penggemukan sapi potong. Penelitian terhitung semenjak bulan Juli s/d Desember 2016. Informan penelitian sebanyak 23 orang, berasal dari Dinas Peternakan Provinsi/Kabupaten/Kota, anggota DPRD, Anggota BAKORLUH Sumbar, Anggota Komisi Penyuluhan Sumbar, penyuluh sub sektor peternakan dan peternak sapi potong. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisa data yang digunakan analisis data kualitatif melalui alat analisis deskriptif interperatif.

Kesimpulan yang didapatkan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki produk kebijakan (makro, meso dan mikro) yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaan penyuluhan sub sektor peternakan. Proses perumusan kebijakannya juga belum dapat teridentifikasi. Namun demikian, proses perumusan kebijakan khususnya untuk produk kebijakan makro dapat dipedomani dengan aturan yang telah berlaku dipemerintahan yang lebih tinggi. Kondisi ini dikarenakan pemerintah mengalami beberapa kendala dalam merumuskan kebijakan, diantaranya adalah berasal dari internal mereka seperti kualitas SDM, dana dan komunikasi antara pelaku pembuat kebijakan dan berasal dari eksternal pemerintah seperti kondisi politik, kondisi perekonomian daerah dan komunikasi politik. Ada juga potensi yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, seperti adanya dasar hukum pembuatan Perda, dukungan sarana dan prasarana, teknologi penunjang, ketersediaan

fasilitas administrasi dan kondisisosi/budaya/agama masyarakat Sumatera Barat yang telah terbiasa dengan kegiatan peternakan sapi. Untuk membantu proses perumusan kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan, pemerintah dapat melibatkan seorang tokoh sebagai perwakilan dari lembaga/institusi yang memahami kondisi dan kebutuhan penyuluhan sub sector peternakan dan dapat menjadi mediator serta komunikator antar pelaku perumus kebijakan dalam setiap tahapan pada proses perumusan kebijakan penyuluhan sub sektor peternakan.

Kata kunci: komunikator, kebijakan makro, sub sektor peternakan, ketahanan pangan.



Agricultural Extension Policy for Animal Husbandry Sub-Sector as a Tool to Boost Sustainable Achievement of Beef Self-Sufficiency in West Sumatra

Abstract

Beef self-sufficiency aims to help the realization of community food security, especially for animal foods. In its implementation, the people's cattle farmers are used as the main actors and become the main partners by the government. However, the condition of the human resources of the livestock farmers does not have good competence in running their business. Therefore, extension of the livestock sub-sector is needed to improve their knowledge and skills. So that the implementation of livestock sub-sector education can run smoothly, it requires a legal basis born from government policies. In fact, the government in West Sumatra does not have the highest policy as the basis for the implementation of the livestock sub-sector extension to help achieve the goal of beef self-sufficiency. Based on this background, this study aims to explain the conditions, processes, potentials and constraints in the formulation of livestock sub-sector extension policies, as well as designing the pattern of the livestock sub-sector extension policy formulation process.

Through the qualitative method, this research was carried out in the Province of West Sumatra which focused on the central region of fattening beef cattle and counted from July to December 2016. The informants of this study were 23 people from the Provincial / District / City Livestock Services, DPRD members, Member of the West Sumatra BAKORLUH, Member of the West Sumatra Extension Commission, livestock sub-sector extension agent and beef cattle breeder. Data collected by documentation, interview and observation techniques. Data analysis techniques used are qualitative data analysis through interpretative descriptive analysis tools.

Conclusions obtained, the government of West Sumatra Province does not have a policy product (macro, meso and micro) that can be a foundation in the implementation of livestock sub sector education. Therefore, the policy formulation process has not yet been identified. However, the process of policy formulation, especially for products of macro policy, can be guided by the rules that have been implemented in the government. This condition is due to the government experiencing several obstacles in formulating policies, including those originating from their internal such as the quality of human resources, funds and communication between actors of policy making and coming from external government such as political conditions, regional economic conditions and political communication. There is also the potential that can be utilized by the government in formulating policies, such as the legal basis for making local regulations, supporting facilities and infrastructure, supporting technology, availability of administrative facilities and sociocultural / religious conditions of the people of West Sumatra who are familiar with cattle breeding activities. To assist the process of formulating extension policy on livestock sub-sector, the government can involve a figure as a representative of institutions / institutions that understand the conditions and extension needs of the livestock sub-sector and can be a mediator and communicator between policy makers in each stage of the sub-sector extension policy formulation process farm.

Keywords: communicator, macro policy, livestock sub sector, food security.

